



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI

## Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



# INDEKS SPBE TAHUN 2021

## PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

#### 1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

#### 2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

#### 3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.

#### 4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

#### 5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

#### 1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

#### 2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

#### 3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

#### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

#### 5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

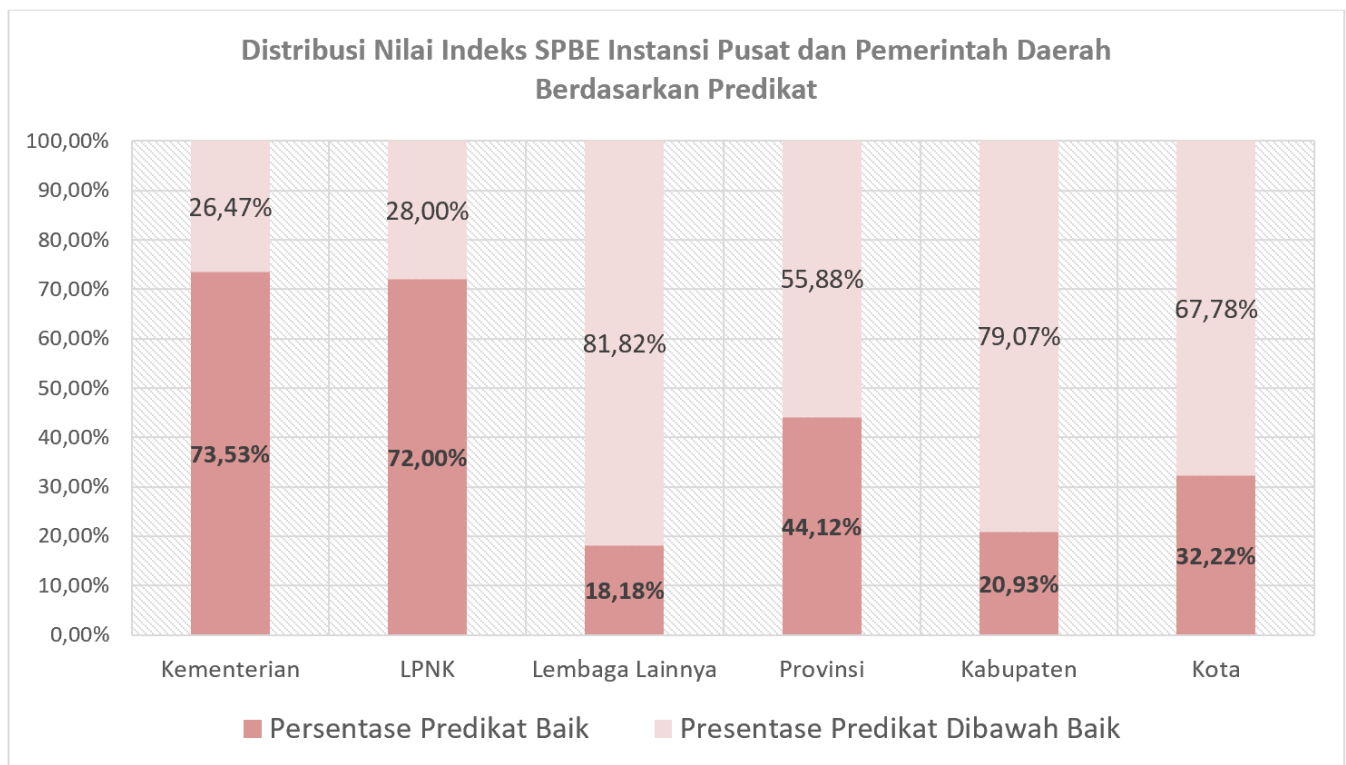
# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

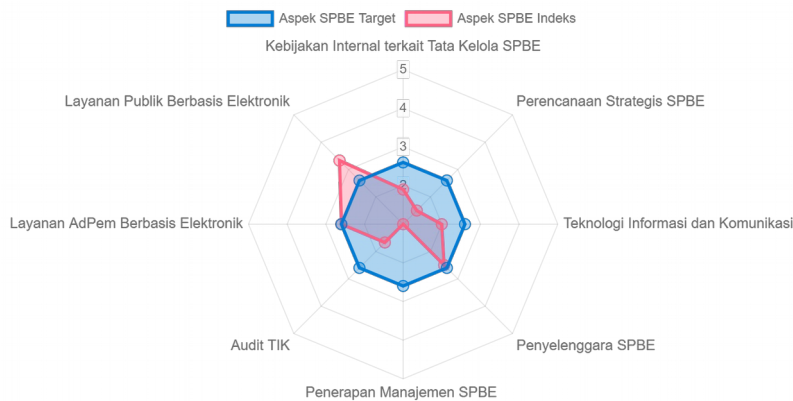
Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88





**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,23
	Domain Kebijakan SPBE	1,90
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,90
	Domain Tata Kelola SPBE	1,90
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
	Penyelenggara SPBE	2,50
	Domain Manajemen SPBE	1,18
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,67
	Domain Layanan SPBE	2,89
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33



**Kekuatan dan Kelemahan**

**A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini belum terlihat adanya kekuatan pada Pemkab Purbalingga.
- **Kelemahan**  
Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal Audit TIK, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung lengkap yang disampaikan.

**B. Perencanaan Strategis SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan strategis SPBE yang sudah dipenuhi pada Pemkab Purbalingga adalah dengan adanya Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terdapat perencanaan yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga.
- **Kelemahan**  
Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE terkait

Arsitektur SPBE, dan inovasi proses bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau perencanaan strategis yang disampaikan.

#### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga adalah dengan Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan  
Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi ini belum terdapat TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga.
- Kelemahan  
Namun di sisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan atau sudah tersedia tetapi baru digunakan oleh sebagian organisasi perangkat daerah.

#### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terdapat tata kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga.
- Kelemahan  
Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki tata kelola terkait kolaborasi penerapan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga.

- Kekuatan  
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga.
- Kelemahan  
Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang lengkap disampaikan.

#### F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga yaitu Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat pelaksanaan audit yang menjadi kekuatan pada Pemkab Purbalingga.
- Kelemahan  
Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum menjalankan Audit TIK terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang lengkap atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini seluruhnya sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga yaitu Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan dinamis, Pengelolaan Barang, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sudah terlihat adanya kekuatan pada Pemkab Purbalingga yaitu pada Layanan Perencanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti data dukung yang memenuhi kriteria.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Layanan kepegawaian, Pengelolaan Barang, pengawasan internal pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang lengkap atau layanan sudah tersedia akan tetap baru memperlihatkan sampai layanan informasi atau interaksi.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini seluruhnya sudah dipenuhi oleh Pemkab Purbalingga yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, Publik Sektor 2, dan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini sudah terlihat adanya kekuatan pada Pemkab Purbalingga yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Publik Sektor 2. Layanan ini dibuktikan dengan adanya bukti data dukung yang memenuhi kriteria.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemkab Purbalingga masih belum memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik terkait Layanan data terbuka, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang lengkap.

## Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Purbalingga, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yaitu pada Layanan pengaduan pelayanan publik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu aplikasi " MATUR BUPATI ", yang memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik. Kemudian pada layanan Publik Sektor 2 yaitu sektor perizinan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK Cloud). Merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Perencanaan Strategis SPBE belum tersedia kecuali pada peta rencana SPBE, dan Rencana dan Anggaran SPBE. Dikarenakan perencanaan strategisnya belum tersedia serta Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan dan Kegiatan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman maka berimbas pada aspek penerapan Manajemen SPBE yang sama sekali belum diterapkan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pada Aspek Kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK sangat perlu menjadi perhatian Pemkab Purbalingga. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.



## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3